

# Membedah Kebijakan Efisiensi APBD NTB 2025

Oleh: Ramli Ernanda



# Tujuan



---

**Memetakan politik anggaran  
dalam pergeseran APBD 2025**

Bagaimana kebijakan efisiensi dilakukan? Siapa yang paling “diuntungkan”? Apa dampaknya terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak?

---

---



# Ketentuan Efisiensi (Inpres 1/2025)

Pemangkasan Transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun mengharuskan pemda melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari TKD terdampak, dan melakukan efisiensi belanja daerah:



Membatasi belanja seremoni, kajian, fgd



Belanja perjalanan dinas (-50%)



Membatasi belanja honorarium



Mengurangi belanja pendukung dengan output tidak terukur



Fokus pada belanja pelayanan publik



Hibah selektif kepada K/L





# Penggunaan Hasil Efisiensi

Merujuk SE Mendagri Nomor 900/833/SJ menjelaskan agar hasil efisiensi yang dilakukan oleh Pemda dialihkan untuk:



Bidang Pendidikan



Bidang Kesehatan



Infrastruktur dan Sanitasi



Optimalisasi pengendalian inflasi,  
dan Stabilitas harga makanan



Penyediaan cadangan pangan



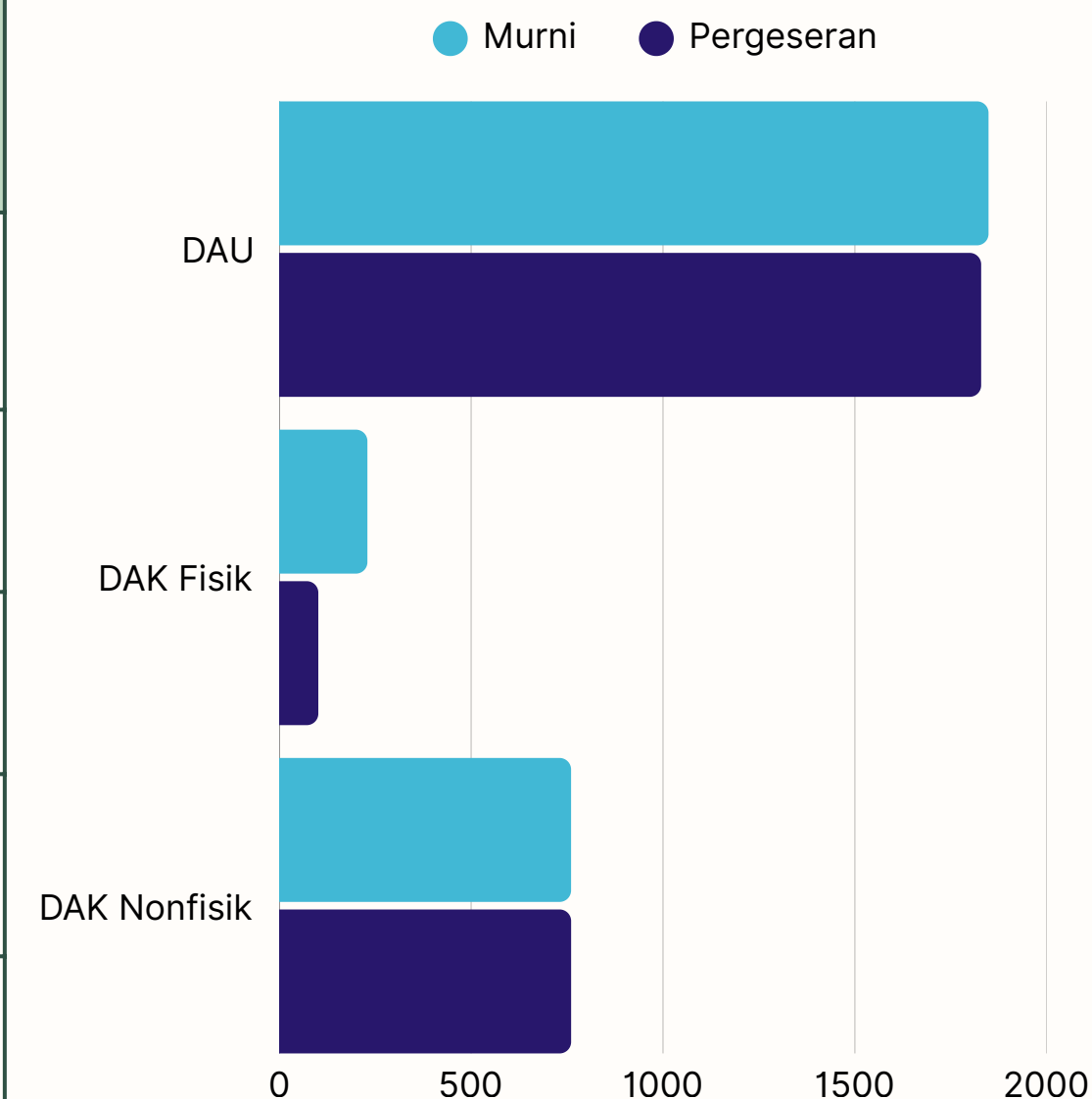
Prioritas lain (kesejahteraan, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi)



# Penyesuaian APBD NTB (dalam miliar rupiah)

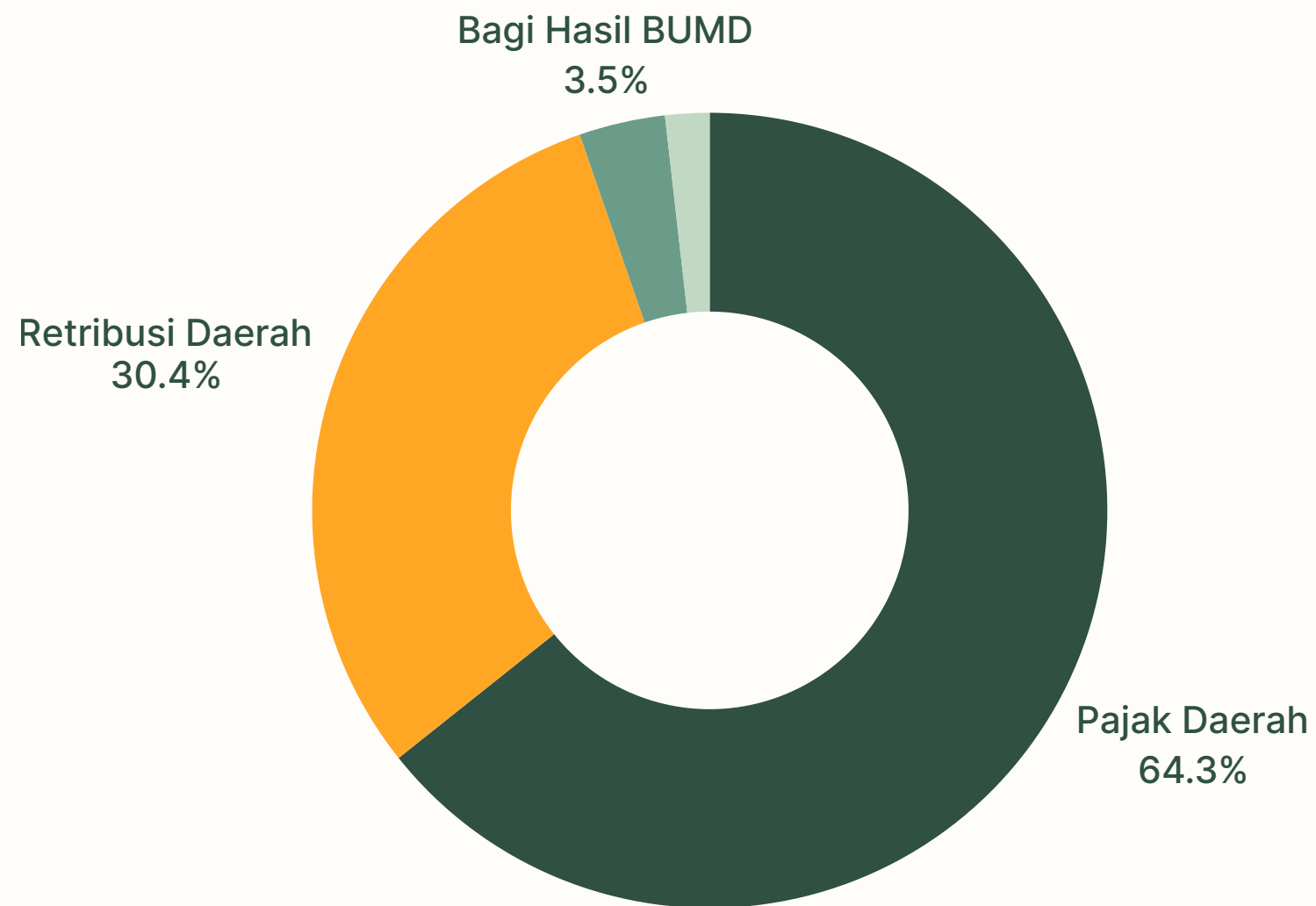
TKD Provinsi NTB yang dipangkas terdiri dari DAU bidang pekerjaan umum Rp19,2 miliar, DAK Fisik Konektivitas (Jalan) Rp58,08 miliar, DAK Fisik Irigasi Rp15,59 miliar, DAK Fisik bidang pangan Rp54,22 miliar).

Keterangan	APBD-M	Pergeseran 1 (Maret)	Pergeseran 2 (Mei)
Pendapatan Daerah	6.330,41	6.186,03	6.186,15
Belanja Daerah	6.232,61	6.218,18	6.218,29
Surplus/(Defisit)	97,79	(32,15)	(32,15)
Penerimaan Pembiayaan	25,00	154,95	154,95
Pengeluaran Pembiayaan	122,79	122,79	122,79



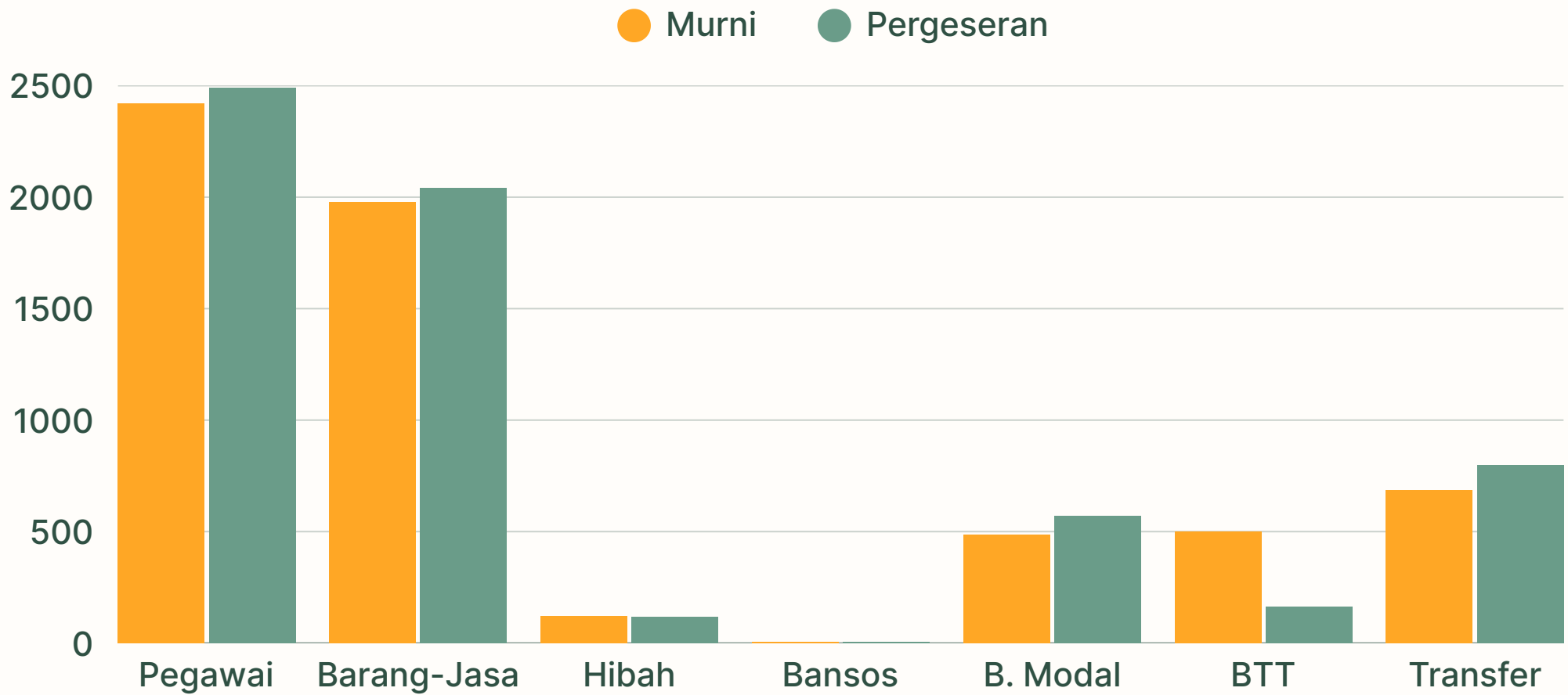
# Kinerja PAD

Target PAD tahun ini diproyeksikan sebesar Rp2,51 triliun, jauh dari potensi yang ada. Terdiri dari Pajak daerah Rp1,61 triliun, retribusi daerah Rp763,29 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp88,67 miliar, dan lain-lain PAD sebesar Rp46,32 miliar.



Keterangan	TA 2025
Pertumbuhan nominal	-13,64%
Tax (PAD) Effort Index	0,01298
Elastisitas PAD	-2,18178
Kontribusi terhadap APBD	40,6%

# Penyesuaian Belanja Daerah



Keterangan	Perubahan (miliar)
Belanja Pegawai	70,17
Belanja Barang dan Jasa	64,02
Belanja Hibah	(5,56)
Belanja Bansos	(0,53)
Belanja Modal	85,56
Belanja Tidak Terduga	(339,36)
Belanja Transfer	111,39

# Belanja Pegawai Naik 2,9%

untuk 25.630 orang ASN, 2 KDH/WKDH  
dan 65 Anggota DPRD

Rincian	Setelah Pergseran (Rp M)	% Perubahan
Gaji dan Tunjangan ASN	1.417,41	2,3%
Tamsil ASN	858,63	3,3%
Gaji dan Tunjangan DPRD	52,04	24,8%
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2,70	0%
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	4.18	0%

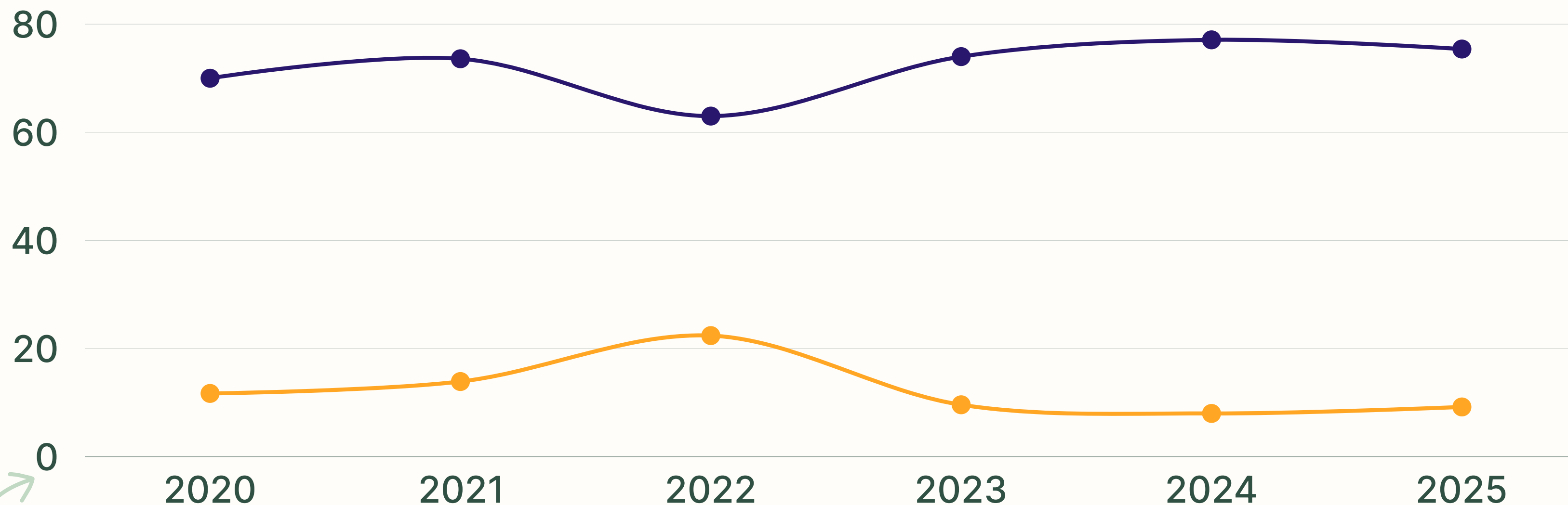
# Belanja Barang dan Jasa Naik 3,2%

Rincian	Setelah Pergseran (Rp M)	% Perubahan
Belanja Barang	664.,37	13,1%
Belanja Jasa	446,95	6,5%
Belanja Pemeliharaan	83,06	29,7%
Belanja Perjalanan Dinas	77,75	(48,1%)
Uang/Jasa untuk Masyarakat/Pihak Lain	35,09	56,2%

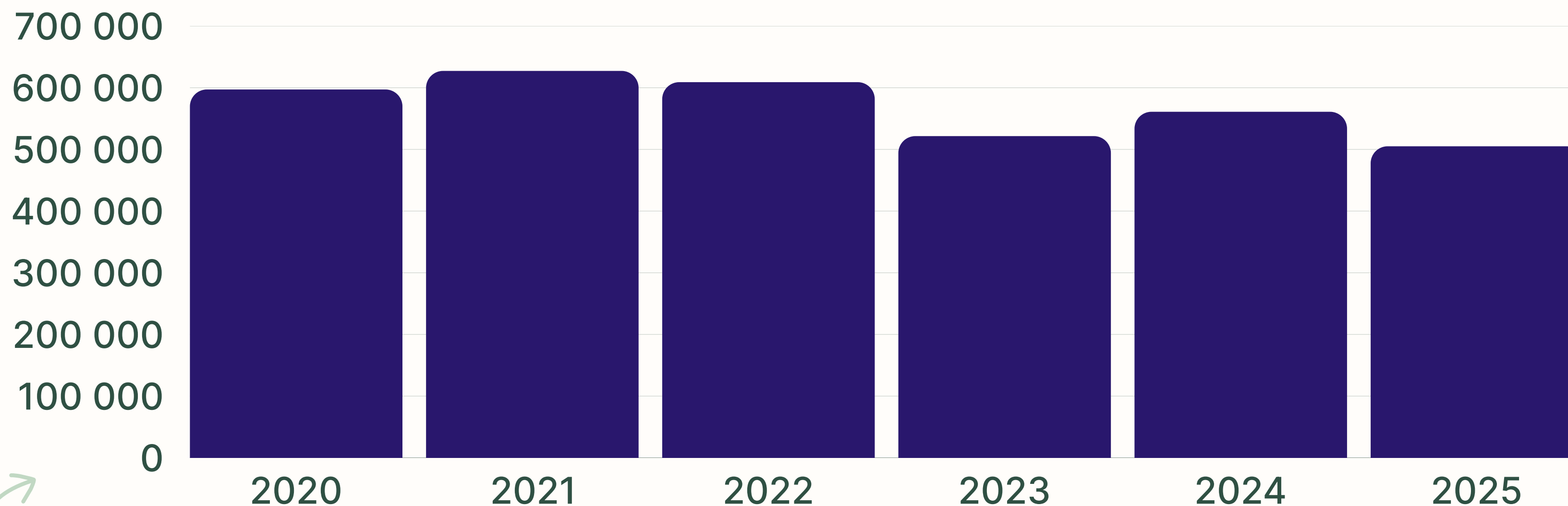
# Belanja Modal Naik 17,6%

Rincian	Setelah Pergseran (Rp Miliar)	% Perubahan
Tanah	7,89	100,0%
Peralatan dan Mesin	291,94	7,9%
Gedung dan Bangunan	124,23	33,9%
Jalan, Jaringan dan Irigasi	125,56	22,2%
Aset lainnya	17,92	(0,4%)

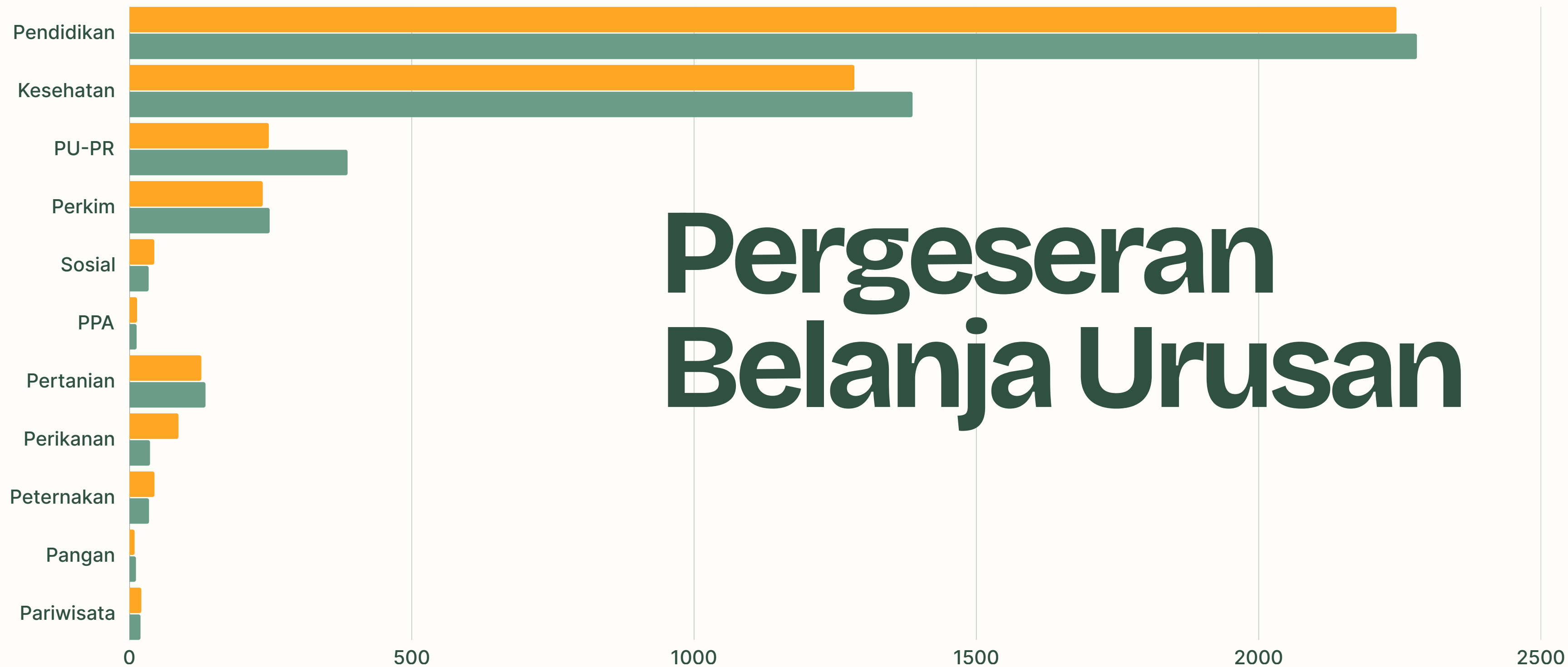
# Keserasian Belanja Daerah paska Efisiensi (operasi v.s modal)



# Belanja Publik per Kapita (cakupan akses dan kualitas pelayanan publik) menurun



● Murni ● Pergeseran



# Pergeseran Belanja Urusan

# Program untuk kelompok rentan yang “tak kebagian anggaran” hasil efisiensi

**PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**  
(Penguatan Posyandu dan Peningkatan  
PHBS) (turun 47% dari RP876 juta)

**PROGRAM PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN** (dari Rp5 miliar jadi Rp2,5  
miliar)

**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK  
(PHA)** - (berkurang 50% dari Rp 600an  
juta)

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM** (Rp0 dari  
Rp13,9 miliar))

**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN  
JAMINAN SOSIAL** (dari Rp7 miliar jadi  
Rp4,6 miliar)

**PROGRAM PENYEDIAAN DAN  
PENGEMBANGAN PRASARANA  
PERTANIAN** (urusan pertanian dan  
peternakan)

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
(Rp0 dari Rp3 miliar)

**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**  
(Rp13,9 miliar jadi Rp9,4 miliar)

**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN  
PANGAN** (hanya Rp104 juta, turun 45%  
dari anggaran awal)

# Kesimpulan

Pemprov NTB menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan APBD di masa mendatang.  
Ketergantungan pada dana transfer, rendahnya kinerja PAD, serta buruknya kualitas belanja daerah.

## Struktur Belanja semakin “Aparatur Heavy”

Alokasi belanja pegawai meningkat 2,9%, sementara belanja publik per kapita menurun drastis. Fakta ini menunjukkan ketimpang dalam belanja daerah yang cenderung memprioritas kebutuhan aparatur

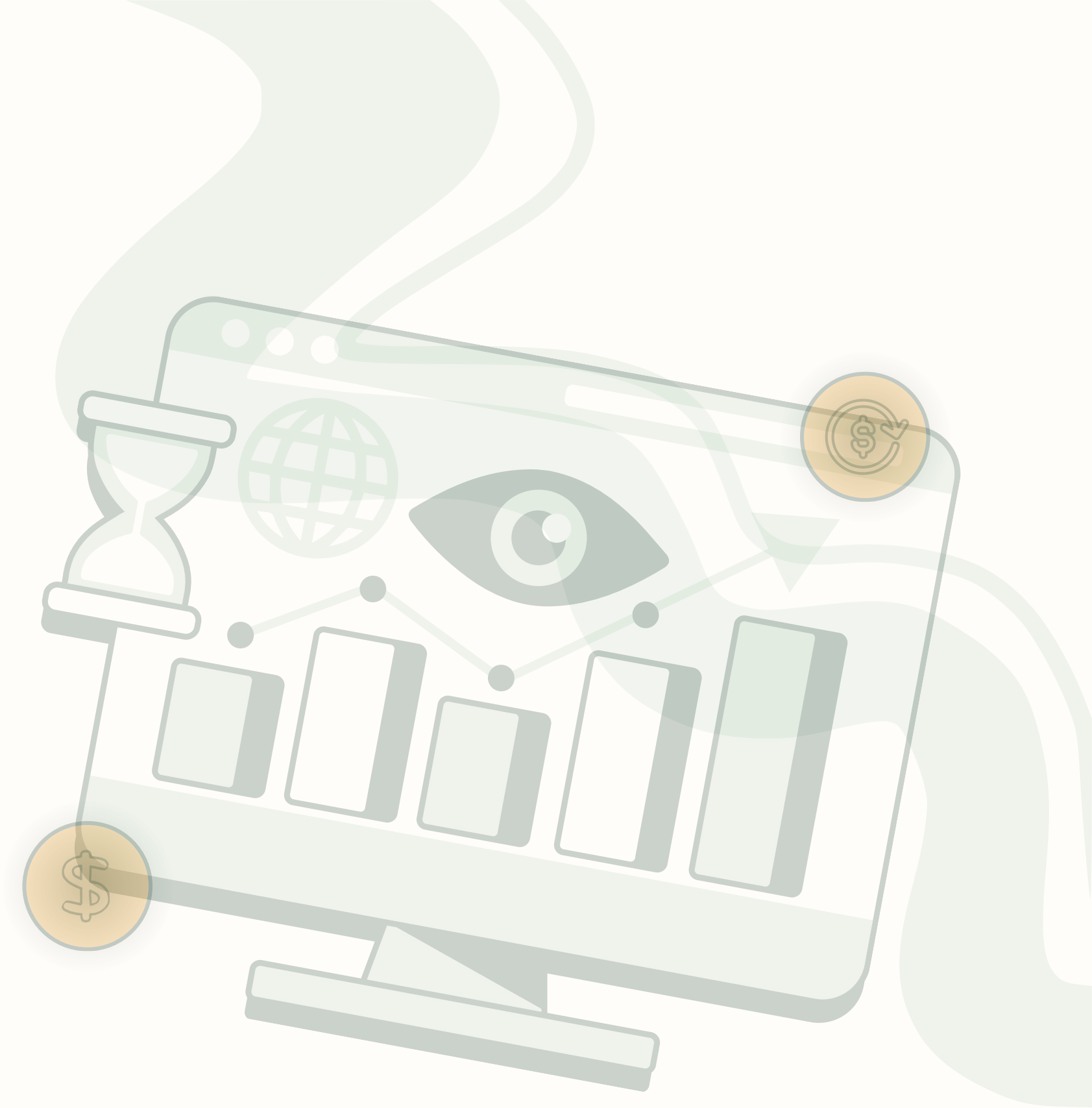
## Ketergantungan pada dana pusat

Pemangkasan TKD menyebabkan APBD mengalami defisit. Situasi ini meningkatkan risiko kerentanan fiskal, dan membatasi ruang gerak atau fleksibilitas kebijakan anggaran.

## Kinerja PAD Mengkhawatirkan

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi untuk mengumpulkan PAD masih cukup rendah.

# Terima kasih



Situs Kami :  
[www.fitrantb.org](http://www.fitrantb.org)

Nomor Telepon :  
0853-3881-1110

Sosial Media :  
FB: Info Anggaran NTB

Alamat Email :  
[ramliernanda@gmail.com](mailto:ramliernanda@gmail.com)